

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. Definisi Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan tidak terlepas dari setiap komponen pembangunan yang tertuang dalam bentuk kebijakan dalam pembangunan negara. Salah satunya adalah pembangunan sektor pertanian. Tidak dapat dipungkiri bahwa, Indonesia merupakan negara yang dominan warganya bergerak pada bidang pertanian. Pembangunan sektor pertanian merupakan keberlanjutan dari adanya Administrasi pembangunan. Sejalan dengan administrasi pembangunan, pembangunan sektor pertanian merupakan pembangunan kearah yang lebih baik dalam keadaan terencana dengan pengembangan usaha pembangunan sektor pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah yang sejatinya tertuang dalam bentuk program-program kerja.

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan - keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2009:4). The liang gie (dalam Pasalong, 2011:3) mendefenisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Pasalong (2011:3) administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Selanjutnya ia menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan

dimensi unsure - unsur. Dimensi karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efisien , efektif dan rasional sedangkan dimensi unsure -unsur administrasi yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
- b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta
- c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

Sebagai suatu perubahan yang terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan kedalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah “bagaimana” meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut. Suatu perangkat pedoman untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi – strategi pembangunan dapat dikatakan sebuah kebijakan (Suharto, 2006:4). Selanjutnya Todaro (dalam Suharto, 2006 :3) mengemukakan bahwa sedikitnya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling terkait yaitu:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat.
- b. Menacapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan.
- c. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan.

Administrasi pembangunan dalam konteks idea menurut Siagian maka dapat dipahami administrasi pembangunan adalah usaha – usaha yang dilakukan oleh desa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan desa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Kegiatan pembangunan di desa dalam Jayaditana (2006:87) meliputi bidang ekonomi, sosial, fisik dan prasarana dan pemerintahan. Administrator adalah orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur. Ia merumuskan tujuan dan kebijakan yang berlaku umum dan menjadi dasar atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan - kegiatan operasional (Silalahi, 2002:21). Jadi administrator pembangunan dapat diartikan secara sederhana yaitu orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur yang merumuskan kebijakan yang menjadi dasar dalam kegiatan pembangunan. Sesuai

dengan penelitian ini maka kedudukan dan posisi puncak yang dimaksud adalah kepala desa.

Kepala desa sebagai administrator pembangunan harus mampu mengemban amanah untuk memperbaiki keadaan desa dengan berbagai program yang sifatnya membangun. Menurut kartono (2006:325) administrator pembangunan bertugas melakukan rentetan usaha bersama rakyat atau masyarakat dalam iklim demokratis untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan tata kehidupan serta sarana kehidupan, demi pencapaian kesejahteraan, kebaikan serta keadilan merata. Administrator pembangunan dalam kaitan menjalankan tugasnya Menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Suharto (2006:7) kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsistendalam pencapaian tujuan tertentu. Pelaksanaan kebijakan dapat berupa program-program yang disusun. Kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai program.

2.2. Pelayanan Publik

Demi terwujudnya pemerintah yang ideal, maka pemerintah haruslah menjadi pelayan masyarakat. Salah satu tugas penting pemerintah adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat. Oleh karena itu pelayanan publik yang baik merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah. Jadi, pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberi layanan kepada masyarakat sesuai aturan pokok ataupun aturan yang telah ditetapkan.

Secara umum pelayanan publik terbagi atas 3 bagian, yaitu barang, jasa dan administratif. Pelayanan dalam bentuk barang publik dapat berupa fasilitas - fasilitas yang menunjang kehidupan masyarakat seperti jalan raya, air bersih dan lain sebagainya. Semakin tinggi kualitas pelayanan dalam bentuk barang publik maka kehidupan masyarakat akan semakin baik, artinya tidak ada masalah yang menghambat dalam melaksanakan kegiatan sehari – hari. Sementara pelayanan dalam bentuk jasa sangat dibutuhkan masyarakat, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan serta penyelenggaraan transportasi. Pelayanan administratif merupakan sebuah pelayanan perizinan, misalnya, adalah pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk), IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dan lain – lain.

Pelayanan publik tidak terlepas dari setiap program pembangunan yang tertuang dalam bentuk kebijakan dalam pembangunan negara. Salah satunya adalah pembangunan sektor pertanian. Tidak dapat dipungkiri bahwa, Indonesia merupakan negara yang warganya bergerak pada bidang pertanian. pembangunan sektor pertanian merupakan keberlanjutan dari adanya pelayanan publik. Sejalan dengan itu, pembangunan sektor pertanian merupakan pembangunan kearah yang

lebih baik dalam keadaan terencana dengan pengembangan usaha pembangunan sektor pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah yang sejatinya tertuang dalam bentuk program-program kerja. Seperti dalam hal ini, pemberdayaan kelompok tani adalah memampukan dan memandirikan masyarakat dalam hal kesejahteraan.

2.3. Pengertian Penyuluh Pertanian

Secara umum terkait dengan sistem penyuluhan, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Penyuluhan dalam arti umum merupakan suatu ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu dan masyarakat agar

dengan terwujudnya perubahan tersebut dapat tercapai apa yang diharapkan sesuai dengan pola atau rencananya. Penyuluhan dengan demikian merupakan suatu sistem pendidikan yang bersifat non formal atau suatu sistem pendidikan diluar sistem persekolahan yang biasa, dimana orang ditunjukkan cara-cara mencapai sesuatu dengan memuaskan sambil orang itu tetap mengerjakan sendiri, jadi belajar dengan mengerjakan sendiri, Kartasapoetra (dalam Erwadi 2012: 8).

Penyuluhan pada dasarnya adalah kegiatan profesional pelayanan jasa pendidikan pembangunan yang bermartabat. Penyuluhan menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan yang mandiri dan berdaya dalam beradaptasi secara adil dan beradab terhadap perubahan lingkungannya. Penyuluh juga merupakan proses atau proses pemberdayaan yang dilaksanakan secara partisipatif untuk mengembangkan kapital manusia dan kapital sosial dalam mewujudkan kehidupan yang mandiri, sejahtera, bermanfaat (Sumardjo, 2010: 8).

Dengan adanya penyuluhan merupakan syarat yang mutlak sebagai pilar untuk mempercepat pembangunan pertanian di Indonesia pada saat ini dan masa yang akan datang. Penyuluhan mampu menjadi kegiatan untuk melakukan pengembangan SDM petani yang merupakan kunci peningkatan kinerja pembangunan. Dalam tulisan yang sama Soedijanto menyatakan penyuluhan dalam pembangunan pertanian harus mampu menjadikan petani sebagai manusia dan petani sebagai subjek dalam pembangunan pertanian. Dengan demikian citra pertanian seharusnya sebagai proses pemberdayaan.

Penyuluhan pertanian dilaksanakan untuk menambah kesanggupan para petani dalam usahanya sehingga dapat memperoleh hasil yang diinginkan para

petani. Jadi penyuluh tujuannya adalah perubahan perilaku petani, sehingga mereka dapat memperbaiki cara bercocok tanamnya, lebih meningkatkan usaha taninya dan lebih layak hidupnya atau yang sering dikatakan maju dan sejahtera. Peranan penyuluh sangatlah penting dalam melakukan perubahan perilaku petani terhadap sesuatu yang baru, serta terampil melaksanakan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan produktifitas, pendapatan atau keuntungan, maupun kesejahteraan petani.

2.4. Fungsi penyuluh pertanian

Kartasapoetra (1994) menyatakan bahwa fungsi penyuluh yang pertama harus memberikan jalan kepada petani untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dalam berusaha seperti cara-cara atau teknologi baru untuk meningkatkan produktifitas, pendapatan dan kesejahteraan petani dalam keluarganya. Melalui penyuluhan, maka penyuluh merupakan rekan kerja petani dalam melaksanakan usaha. Penyuluh dapat membimbing, mengarahkan petani dengan pengetahuan dan teknologi yang berkembang untuk diterapkan para petani masing-masing dalam praktek usaha taninya. Fungsi penyuluh yang lain adalah sebagai penyampai, pengusaha dan penyesua program nasional dan regional agar dapat diikuti dan dilaksanakan oleh para petani. Program-program masyarakat petani harus terlahir dari intikad baik para petani untuk mensukseskan atau partisipasinya dalam tujuan pembangunan yang dapat diperhatikan oleh pemerintah (pembuat program tingkat nasional dan regional).

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sama sekali tidak menganulir Undang Undang Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan, dijelaskan secara rinci pada Bab II Asas Dan Tujuan.

Sebagaimana dijelaskan bahwa fungsi sistem penyuluhan pertanian adalah:

- a. memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
- c. meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan;
- e. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;
- f. menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan serta melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian dan kehutanan yang maju serta modern bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Berdasarkan uraian fungsi penyuluhan pertanian yang termuat dalam UU tersebut maka diperlukan suatu konsekuensi dan strategi yang logis untuk mencapai tujuan penyuluhan yang mendukung keberhasilan program

pembangunan pertanian secara efektif dan efisien serta berkelanjutan dengan implementasi metode dan teknik yang relevan dan akuntable.

2.5. Konsep pemberdayaan

secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses memperoleh daya/kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Berkenan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni (39:1998) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal.

- a. Pengembangan (enabling), yaitu mengembangkan aspek sosial ekonomi masyarakat juga mengandung arti melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya pengembangan masyarakat terkait pemberian bantuan dalam rangka proses pemberdayaan masyarakat seperti pemberian pelatihan keterampilan tentang penguasaan teknologi dan pengetahuan manajerial dalam menjalankan dan mengembangkan usaha yang diberikan.
- b. Memperkuat potensi atau daya (empowering) yaitu memperkuat potensi dengan cara memberikan pendidikan dan membuka lahan-lahan potensial yang terdapat di daerah tersebut serta memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan ini bertujuan untuk memanfaatkan peluang-peluang aspek sosial ekonomi yang ada dan harus dibekali dengan sumberdaya manusia yang ada.

- c. Terciptanya kemandirian. Yaitu masyarakat sudah mampu mengembangkan dan meningkatkan produktifitas dari usaha tersebut tanpa mengharapkan bantuan apapun dari pemerintah maupun lembaga suadaya masyarakat lainnya.

Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses sebagai akibat dari mana individu mempunyai kemandirian, motivasi, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam cara-cara memberikan rasa kepermukaan dan pemenuhan dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Konten mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat berorientasi pada pembangunan yang tercermin pada empat generasi yaitu:

1. Mengutamakan kesejahteraan rumah tangga yaitu dengan berusaha segera memenuhi kekurangan dengan kebutuhan tertentu yang dialami individu atau keluarga, seperti kebutuhan makanan, kesehatan dan pendidikan melalui pemberian modal, keterampilan dan lahan baru.
2. Memusatkan kegiatan antara lain meliputi kesehatan, penerapan teknologi tepat guna dan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini persoalan masyarakat bawah (grassroot) tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan atas-bawah (top down) melainkan kebutuhan

bawah-atas (bottom up) agar intervensi program benar-benar terealisasi.

3. Melihat permasalahan dampak pembangunan cenderung melihat jauh keluar daerahnya, tingkat regional, nasional dan internasional.
4. Sebagai fasilitator gerakan masyarakat, hal ini dilakukan dengan membantu rakyat dengan mengorganisasi diri, mengidentifikasi kebutuhan lokal dengan memobilisasi sumberdaya yang ada pada mereka.

Berkaitan dengan itu Menurut Boediono program pemberdayaan masyarakat hendaknya dilaksanakan sesuai dengan kondisi di daerah masing – masing. Namun kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

1. Program pemberdayaan masyarakat hanya berdaya baik dan efektif apabila ada suasana tenang dan stabil.
2. Program pemberdayaan masyarakat hanya akan berjalan efektif apabila pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan.
3. Pemberdayaan harus dikaitkan dengan kelestarian lingkungan.
Lingkungan hidup yang lestari dan terjaga dengan baik memungkinkan distribusi kesejahteraan antara warga masyarakat secara merata.
4. Program pemberdayaan masyarakat harus merupakan program yang berkelanjutan yang dapat terus – terus berjalan dan dapat mandiri.

Lebih lanjut Budiono (2011:45) mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dengan memberdayakan masyarakat untuk menghasilkan

nilai tambah maka paling tidak harus ada perbaikan empat hal yaitu 1) akses terhadap sumberdaya yaitu dengan cara memberikan pelatihan ketrampilan terhadap masyarakat dan penyediaan lahan usaha baru; 2) akses terhadap teknologi, yaitu suatu kegiatan dengan menggunakan alat yang lebih baik dan efisien guna meningkat hasil produksi; 3) akses terhadap pasar, yaitu produk yang dihasilkan harus dapat dijual untuk mendapatkan nilai tambah, ini berarti, penyediaan sarana produksi dan peningkatan keterampilan harus diimbangi dengan tersedianya pasar terus-menerus; 4) akses terhadap sumber pembiayaan yaitu koordinasi dan pengembangan sistem permodalan dalam bentuk hibah dan kredit yang menjangkau lapisan masyarakat bawah perlu dilanjutkan dan ditingkatkan.

Budiono juga mengemukakan bahwa alokasi bantuan yang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin memerlukan suatu program yang langsung menyentuh dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan cara mengembangkan potensi desa yang ada serta pemberian pelatihan–pelatihan dasar terhadap masyarakat, pemberian modal, serta melakukan pendampingan secara terprogram dan berkelanjutan sehingga masyarakat benar-benar mandiri. Program tersebut harus akurat dan dilaksanakan secara bertahap. Dalam hal ini kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin dapat dikategorikan menjadi dua yaitu; 1) kebijakan tidak langsung meliputi upaya menciptakan ketentraman dan kestabilan situasi ekonomi dan sosial. Contohnya: mengendalikan jumlah penduduk, melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok masyarakat yang miskin melalui kegiatan pelatihan. Sedangkan kebijakan yang langsung mencakup yaitu; a) pengembangan data dasar dalam menentukan kelompok sasaran

(targeting); b) penyediaan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan); c) penciptaan kesempatan kerja (program magang, program padat karya).

2.5.1 Pemberdayaan Masyarakat

Dalam konteks penelitian ini pemberdayaan kelompok tani dapat dipandang sebagai sebuah kebijakan untuk memperdayakan masyarakat, sehingga mengurangi angka kemiskinan itu sendiri, pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya untuk mencapai sasaran organisasi yang akan dilaksanakan oleh masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Karena itu usaha kelompok tani yang dilakukan oleh masyarakat diharapkan dapat mengembangkan potensi sumber daya alam yang memiliki yang dapat dijangkau kesemua lapisan masyarakat di desa.

Dalam mencapai kesejahteraan hidup masyarakat tentu dibutuhkan pemberdayaan yang tepat dengan dukungan sumber daya yang memadai sehingga sebagaimana dalam konteks penelitian ini pemberdayaan masyarakat desa dapat dipahami sebagai bagian dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menguatkan aspek sosial ekonomi masyarakat, yaitu:

1. Bantuan modal dalam bentuk hibah atau kredit

Modal finansial merupakan faktor produksi yang sangat esensial bagi masyarakat dalam proses peningkatan taraf hidupnya.

2. Pemberian keterampilan

Pemberian keterampilan merupakan faktor produksi yang sangat strategis dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

3. Peningkatan kemampuan untuk menguasai teknologi
4. Akses pasar.

2.6. Kelompok Tani

Kelompok tani adalah kelembagaan pertanian yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan lingkungan (sosial, ekonomi, dan sumber daya lainnya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya serta ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani yang saling mengenal, akrab, saling percaya, mempunyai kepentingan dalam berusaha tani. Kelompok tani merupakan sebuah lembaga yang menyatukan para petani secara horizontal dan dapat dibentuk berapa unit dalam satu desa, bisa berdasarkan komoditas, areal tanam pertanian dan gender (syahyuti, 2007). Dengan demikian, untuk mengetahui gerak pembangunan perlu perhatian terhadap kelompok tani yang ada di desa. kelompok tani didefinisikan sebagai sebuah kelembagaan ditingkat petani yang dibentuk untuk mengorganisasikan para petani dalam menjalankan usaha taninya (hermanto dan swastika,2011).

Kelompok tani pada hakikatnya adalah untuk menggerakkan sumber daya manusia petani. Pembinaan kelompok tani berperan dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani. Tebentuknya kelompok ini didorong oleh kesadaran dan keinginan yang kuat untuk meningkatkan penghasilan pertanian sehingga dengan sendirinya dapat merubah penghasilan ekonomi keluarga dan juga untuk mengejar kemajuan, perkembangan dan bahkan berprestasi.

Kelompok tani juga dapat membantu petani yang tergabung kedalam keanggotaan untuk memfasilitasi segala kebutuhan mulai dari pembelian sarana produksi sampai penanganan pascapanen dan pemasaran (Hariadi, 2011), kelompok tani juga menjadi titik penting untuk menjalankan, menterjemahkan konsep hak petani kedalam kebijakan, strategi, dan program yang layak kedalam satu kesatuan utuh dan pengembangan kedalam langkah operasional (Djiwandi, 1994). Kelompok tani memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai unit belajar, unit kerjasama, dan unit produksi. Apabila ketiga unit tersebut sudah berjalan, maka diarahkan menjadi unit kelompok usaha. Keberhasilan kelompok tani menjalani fungsi-fungsi tersebut tidak lepas dari pengaruh kerja keras anggota dalam kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan yang lebih disepakati bersama.

Sesuai dari pendapat para ahli diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa kelompok tani merupakan kelompok atau kumpulan petani yang mempunyai suatu tujuan bersama dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan sumberdaya ekonomi pada masyarakat.